



Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Desma Ramadhan ^{1*}, dan Septian Arief Budiman²

¹ Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang; Tangerang Selatan, Banten;
e-mail : desmaramadhan02@gmail.com

² Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang; Tangerang Selatan, Banten;
e-mail : dosen01126@unpam.ac.id

* Corresponding Author : Desma Ramadhan

Abstract: This study aims to analyze the effect of service quality and tax rates on tax evasion among individual taxpayers at KPP Pratama Serpong. A quantitative approach with multiple linear regression was applied using questionnaire data from 100 respondents. The results show that service quality has a significant negative effect on tax evasion, meaning that better tax authority services reduce taxpayers' tendency to evade taxes. Conversely, tax rates have a significant positive effect, where higher or burdensome rates increase the likelihood of evasion. Simultaneously, service quality and tax rates significantly influence tax evasion, contributing 22.5% to its variation. These findings highlight the importance of improving service quality and applying fair tax rates to minimize tax evasion practices.

Keywords: Tax Evasion; Service Quality; Tax Rate; Tax Compliance; Taxpayer Perception

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda berdasarkan data kuesioner dari 100 responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang kemudian dianalisis secara kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak, artinya semakin baik pelayanan fiskus maka kecenderungan penggelapan menurun. Sebaliknya, tarif pajak berpengaruh positif signifikan, sehingga semakin tinggi tarif yang dianggap memberatkan semakin besar peluang terjadinya penggelapan. Secara simultan, kualitas pelayanan dan tarif pajak berpengaruh signifikan dengan kontribusi sebesar 22,5% terhadap variasi penggelapan pajak. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan dan penerapan tarif yang adil untuk menekan praktik penggelapan pajak.

Kata kunci: Penggelapan Pajak; Kualitas Pelayanan; Tarif Pajak; Kepatuhan Pajak; Persepsi Wajib Pajak

Received: 2 Juli 2025

Revised: 4 Agustus 2025

Accepted: 10 November 2025

Published: 12 November 2025

Curr. Ver.: 12 November 2025



Copyright: © 2025 by the authors.
Submitted for possible open
access publication under the
terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

1. Pendahuluan

Fenomena penggelapan pajak di Indonesia masih marak terjadi, terutama akibat persepsi negatif terhadap kualitas pelayanan dan tingginya tarif pajak. Penggelapan pajak atau *tax evasion* adalah tindakan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan melanggar hukum perpajakan sebagaimana dijelaskan oleh [4] dan [7]. Laporan kasus-kasus mulai dari direktur PT Rockstone Mineral Indonesia hingga notaris di Bali, menegaskan bahwa praktik ini menimbulkan kerugian negara dan memerlukan perhatian akademik serta kebijakan yang perlu ditegaskan.

Studi sebelumnya oleh [10] melakukan penelitian yang bertujuan melakukan pengujian pengaruh yang dimiliki-commerce kemudian juga tarif pajak kepada adanya penggelapan pajak., dengan dua variabel bebas yaitu e-commerce dan tarif pajak. Sedangkan [8] menyatakan pengaruhnya tidak signifikan. Keterbatasan utama metode-metode tersebut terletak pada konteks sampel (dominan di Jakarta) dan belum adanya pengujian simultan kedua variabel dalam populasi wajib pajak KPP Pratama Serpong, yang memiliki basis WP individu cukup besar.

Penelitian ini memfokuskan objek terhadap kualitas pelayanan dan tarif pajak yang berdampak kepada pelanggaran pajak di KPP Pratama Serpong karena memiliki jumlah wajib pajak yang tinggi. Dengan tiga rumusan masalah yang mendasari diantaranya: (1) apakah kualitas pelayanan dan tarif pajak dapat secara simultan terhadap penggelapan pajak?, (2) apakah kualitas pelayanan dapat berpengaruh terhadap penggelapan pajak?, dan (3) apakah tarif pajak dapat berpengaruh terhadap penggelapan pajak?.

2. Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait

2.1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwasannya rencana seseorang dalam melakukan suatu perilaku dilatarbelakangi oleh tiga unsur penting, berupa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang diterima. Pada lingkup perpajakan, teori ini menggambarkan bahwa wajib pajak akan berperilaku patuh jika mereka memiliki keyakinan bahwa tindakan tersebut membawa manfaat, lingkungan sosial mendukung kepatuhan, dan mereka merasa mampu untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Ketika ketiga komponen ini tidak terpenuhi, maka kecenderungan untuk melakukan pelanggaran seperti penggelapan pajak akan meningkat.

2.2 Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak atau *tax evasion* didefinisikan sebagai bentuk pelanggaran hukum yang dijalankan seseorang yang memiliki kewajiban pajak dengan tujuan mengecilkan atau mengurangi tanggungan pajak melalui berbagai langkah ilegal, seperti memanipulasi laporan keuangan atau tidak melaporkan pendapatan secara penuh [11]. Penggelapan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah karena menurunkan potensi penerimaan negara dan mengganggu keadilan fiskal. Menurut [7] tindakan ini terjadi karena adanya peluang, motif, serta rasionalisasi yang dimiliki wajib pajak untuk menghindari kewajiban mereka. Faktor-faktor yang mendorong penggelapan pajak antara lain adalah rasa ketidakadilan atas sistem perpajakan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah. Studi oleh [14] dan [5] menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap pelayanan fiskus dan beban tarif yang tinggi seringkali menjadi pemicu utama. Oleh sebab itu, pendekatan penelitian ini dilakukan pengujian kembali dua variabel tersebut secara simultan untuk memperkuat temuan terdahulu dan memberikan konteks lokal yang lebih spesifik di wilayah KPP Pratama Serpong.

2.3 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan perpajakan mencakup kejelasan informasi, kemudahan prosedur, kompetensi petugas, dan kecepatan layanan. Menurut [2], persepsi terhadap kualitas pelayanan sangat memengaruhi kepuasan wajib pajak dan berdampak pada kepatuhan. Ketika pelayanan dirasa baik, wajib pajak lebih cenderung taat karena merasa dihargai dan diperlakukan secara profesional. Sebaliknya, layanan yang lambat, tidak jelas, atau diskriminatif justru mendorong penghindaran pajak. [12] pada penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, sementara studi dari [6] menambahkan bahwa kombinasi antara pelayanan dan sanksi juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara simultan. Dalam studi ini, variabel kualitas pelayanan dijadikan sebagai salah satu faktor utama untuk diuji terhadap penggelapan pajak. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana persepsi wajib pajak individu terhadap kualitas pelayanan fiskus berdampak terhadap perilaku mereka dalam menjalankan kewajiban pajak.

2.4 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan faktor penting dalam membentuk persepsi wajib pajak terhadap keadilan fiskal. Tarif yang dianggap terlalu tinggi menimbulkan beban dan mendorong wajib pajak melakukan penggelapan. Studi oleh [10] menyatakan tarif pajak memiliki pengaruh tinggi terhadap penggelapan pajak, terutama di kalangan pelaku e-commerce. Hal tersebut didukung juga oleh penelitian [15] yang menemukan bahwa persepsi atas keadilan tarif memengaruhi perilaku perpajakan. Namun demikian, terdapat pula penelitian seperti [1] serta [8] yang mengatakan bahwa tarif pajak tidak mempunyai pengaruh tinggi terhadap penggelapan. Ketidakkonsistenan ini dapat disebabkan oleh variasi dalam jenis tarif (final vs progresif), sektor usaha responden, atau latar belakang sosial ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, tarif pajak sebagai variabel independen untuk melihat apakah persepsi tinggi rendahnya tarif memengaruhi kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.

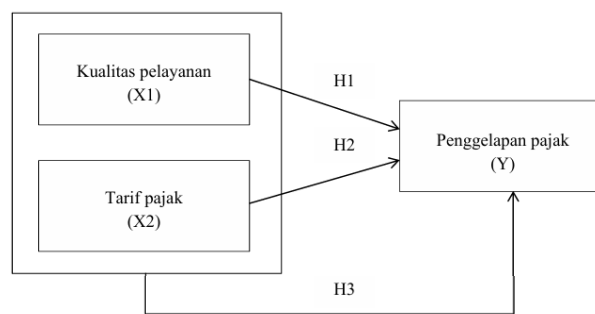
2.5 Penelitian Terdahulu

Berbagai studi terdahulu memberikan dasar empiris yang penting bagi penelitian ini. [5] menguji pengaruh lima variabel termasuk kualitas layanan dan menemukan bahwa variabel tersebut signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun, ia tidak menyertakan tarif pajak dalam model analisis. [10] meneliti tarif pajak dan pelaku e-commerce, tetapi tidak mempertimbangkan persepsi kualitas pelayanan sebagai faktor penentu. Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menggabungkan dua variabel utama: kualitas pelayanan dan tarif pajak, untuk melihat pengaruh simultannya kepada penggelapan pajak untuk pribadi berkewajiban pajak. Selain itu, studi oleh [12] dan [15] juga menjadi acuan dalam pemilihan indikator variabel dan desain instrumen kuesioner. Penelitian tersebut memakai regresi linier berganda agar memberikan analisis secara lebih komprehensif, serta berfokus pada wilayah KPP Pratama Serpong yang belum banyak dikaji dalam penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, kontribusi utama penelitian ini terletak pada kombinasi variabel, konteks lokal, dan pendekatan simultan dalam menguji determinan penggelapan pajak secara empiris.

[1] memasukkan religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, dan keadilan pajak ke dalam model mereka; hasilnya menunjukkan tarif pajak tidak memberikan pengaruh yang tinggi pada penggelapan pajak, tetapi mereka tidak menguji kualitas pelayanan sebagai pemicu niat wajib pajak. [8] meneliti love of money, machiavellian, self-assessment system, pengetahuan perpajakan, dan tarif pajak; mereka juga menemukan tarif pajak tidak signifikan, sehingga menyoroti pentingnya faktor psikologis, namun lagi-lagi kualitas pelayanan diabaikan. Sementara itu, [11] berfokus pada sistem perpajakan, keadilan pajak, dan tarif pajak di KPP Pratama Tangerang Timur dan melaporkan bahwa tarif pajak memberikan pengaruh positif signifikan kepada penggelapan pajak, tetapi tidak memasukkan variabel pelayanan sebagai prediktor.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah jalur pemikiran yang dibuat dan dibangun dengan didasari proses peneliti yang dilakukan. Kerangka pikir memiliki definisi gambaran yang terdiri dari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat agar dapat memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Maka, setiap penyusunan paradigma penelitian harus memiliki dasar yang kuat pada kerangka berpikir yang jelas dan sistematis. Berdasarkan landasan teori yang ada serta temuan dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga kerangka berpikir pada penelitian ini dibangun atas dasar hubungan antara dua variabel independen, yaitu kualitas pelayanan (X1) dan tarif pajak (X2), terhadap variabel dependen, yaitu penggelapan pajak (Y). Hubungan ini dirumuskan dalam tiga hipotesis utama: H1 menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh pada penggelapan pajak, H2 menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh pada penggelapan pajak, dan H3 menyatakan bahwa kualitas pelayanan dan tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

2.7 Pengembangan Hipotesis

Peneliti menemukan beberapa hipotesis yang kemudian akan diuji dalam penelitian ini. Hipotesis tersebut disusun untuk menjawab pengaruh secara parsial ataupun simultan terhadap dua variabel independen dengan variabel dependen, yaitu: (H1) Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, didasarkan pada temuan bahwa pelayanan fiskus yang buruk mendorong persepsi negatif dan ketidakpercayaan wajib pajak, sehingga meningkatkan kecenderungan melakukan penggelapan (12; 5). (H2) Tarif pajak berpengaruh tinggi pada penggelapan pajak., merujuk pada studi yang menemukan bahwa tarif yang dianggap tinggi atau tidak adil mendorong perilaku menghindari pajak (10; 11). (H3) Kualitas pelayanan dan tarif pajak dengan simultan berpengaruh tinggi pada penggelapan pajak., mengacu pada asumsi bahwa kombinasi antara persepsi pelayanan yang rendah dan beban tarif yang tinggi akan memperkuat niat penggelapan pajak, seperti dijelaskan dalam kerangka TPB.

3. Metode yang Diusulkan

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif yang memiliki landasan filosofat positivisme. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan diolah secara statistik untuk dilakukan pengujian hipotesis mengenai hubungan antar variabel independen dan dependen. Pengambilan data dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong pada periode Januari – Juni 2024, karena kantor ini memiliki basis wajib pajak orang pribadi yang heterogen dan relatif besar sehingga relevan sebagai lokasi uji empiris.

3.2 Operasional Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel adalah proses menerjemahkan konsep abstrak menjadi indikator terukur agar dapat diobservasi secara empiris, langkah ini penting dalam penelitian kuantitatif karena menentukan validitas temuan [9]. Penelitian ini mengklasifikasikan variabel menjadi variabel dependen penggelapan pajak (Y) dan dua variabel independen, berupa kualitas pelayanan (X1) dan tarif pajak (X2). Masing-masing dikembangkan dari teori perpajakan dan riset terdahulu, kemudian diukur dengan skala Likert lima poin untuk memudahkan analisis statistik. Penggelapan pajak (Y) didefinisikan sebagai upaya wajib pajak mengurangi atau menghapus beban pajak melalui cara-cara ilegal, seperti memalsukan data atau tidak melaporkan penghasilan [9].

Konsep ini menjadi fokus karena memengaruhi penerimaan negara dan keadilan fiskal. Indikator perilaku penggelapan diadaptasi dari [16] meliputi: (a) tidak menyerahkan SPT tepat waktu, (b) menyerahkan SPT tetapi salah, (c) tidak terdaftar atau menggunakan NPWP dengan tidak semestinya, (d) tidak menyerahkan pajak yang dipotong/pungut, dan (e) menyampikan penghasilan lebih sedikit daripada semestinya. Kelima indikator menangkap aspek formal dan substantif ketidakpatuhan. Setiap item indikator Y dinilai dari “sangat tidak setuju” dengan nilai skor 1 hingga “sangat setuju” dengan nilai skor 5. Semakin tinggi skor, semakin besar kecenderungan responden melakukan penggelapan pajak. Instrumen ini diuji validitas ($r > 0,30$) dan reliabilitas (Cronbach's $\alpha > 0,60$) sebelum digunakan dalam analisis.

Kualitas pelayanan (X1) dimaknai sebagai tingkat pemenuhan kebutuhan dan harapan wajib pajak melalui interaksi profesional, tepat waktu, dan transparan dengan otoritas pajak.

Persepsi positif diharapkan menumbuhkan sikap patuh, sedangkan persepsi negatif memicu niat menghindar. Indikator X1 mengacu pada model SERVQUAL, keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan bukti langsung. Kelima dimensi ini mewakili aspek proses (kecepatan, akurasi), hubungan interpersonal (empati), dan bukti fisik (fasilitas, penampilan petugas). Masing-masing indikator X1 diukur dengan item pernyataan skala Likert; contoh: “Petugas pajak memberikan penjelasan dengan jelas dan tepat waktu.” Skor tinggi menunjukkan persepsi layanan yang baik. Data kemudian diuji reliabilitasnya agar konsisten menggambarkan kualitas pelayanan. Tarif pajak (X2) didefinisikan sebagai ketentuan besaran persentase atau nominal yang harus dibayarkan wajib pajak atas penghasilan sesuai dasar pengenaan pajak. Persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan proporsionalitas tarif dipandang memengaruhi niat penggelapan. Indikator X2 diadopsi, yaitu: (a) penerima penghasilan besar membayar PPh lebih besar, (b) tarif proporsional dipandang adil, (c) tarif yang sama untuk setiap WP dianggap adil, dan (d) pengenaan tarif PPh orang pribadi dinilai adil. Item-item ini diukur melalui skala Likert, skor lebih besar merefleksikan persepsi tarif yang semakin adil dan, secara teori, menurunkan kecenderungan penggelapan pajak.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan oleh peneliti kali ini merupakan semua pribadi wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. Menurut Sugiyono (9), populasi memiliki definisi daerah generalisasi yang tersusun dari objek atau subjek yang mempunyai identitas tertentu dan dijalankan oleh peneliti untuk dikaji serta dibuat kesimpulan. Pemilihan populasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa KPP Pratama Serpong memiliki karakteristik wajib pajak yang cukup bervariasi, baik dari segi jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, maupun tingkat kepatuhan perpajakan, sehingga dinilai representatif untuk mengkaji fenomena penggelapan pajak berdasarkan persepsi terhadap kualitas pelayanan dan tarif pajak.

Sampel untuk penelitian ini sebanyak 100 responden yang diambil penulis menggunakan cara convenience sampling, atau teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan akses peneliti terhadap responden. Menurut [9], sampel merupakan bagian dari jumlah dengan karakteristik yang ada pada populasi tersebut. Pemilihan banyaknya sampel dilakukan dengan pendekatan rumus Slovin seperti pada persamaan (1) dengan tingkat kesalahan 10%, untuk memperoleh estimasi yang cukup akurat terhadap parameter populasi. Dengan demikian, sampel ini diharapkan mampu menciptakan gambaran empiris yang terpercaya terkait pengaruh kualitas pelayanan dan tarif pajak dengan penggelapan pajak.

$$n = \frac{N}{N.moe^2 + 1} \quad (1)$$

$$n = \frac{174.663}{174.663.(0,1)^2 + 1} = 99,9 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

moe^2 = *margin of error* 10%

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup berbasis skala Likert lima poin, yang dibagikan dengan langsung terhadap 100 pribadi wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Serpong. Kuesioner tersebut terdiri atas tiga bagian utamanya data demografis responden, item pertanyaan mengenai persepsi terhadap kualitas pelayanan, serta tarif pajak dan penggelapan pajak. Kuesioner dirancang berdasarkan indikator yang telah dioperasionalkan dari teori dan penelitian terdahulu, dan terlebih dahulu diuji validitas serta reliabilitasnya. Teknik pengumpulan data adalah proses pencarian dan

penyusunan sistematis atas jawaban responden, catatan lapangan, dan bukti, dengan mengorganisasikannya ke dalam kelompok, melakukan sintesis, memilih data penting, dan menyimpulkannya agar mudah dipahami [9].

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan perlakuan dalam pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang didapat dari hasil jawaban narasumber, catatan tempat kejadian, dan bukti, dengan mengorganisasikan hasil data ke dalam kelompok, kemudian dibagi ke dalam beberapa unit, melakukan sintesa, dimasukkan ke dalam pola, dipilih bagian data yang penting dan yang seharusnya diperdalam, dan kemudian dibuat kesimpulan sehingga dapat mempermudah dimengerti untuk diri sendiri maupun orang lain [9]. Metode Analisis data yang dipakai yaitu metode analisis regresi berganda dengan bantuan Microsoft excel dan pengolahan data SPSS Versi 26. Hal ini supaya hasil yang didapat dari analisis dan pengujian tersebut dapat memberikan jawaban yang akurat tentang penelitian yang diteliti. Statistik deskriptif menunjukkan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum.

Statistik deskriptif menjelaskan data yang akan menjadi suatu informasi lebih jelas dan mudah untuk dimengerti [3]. Uji signifikansi dijalankan dengan cara membandingkan nilai r_{hitung} dengan nilai r_{tabel} . Uji reliabilitas ditujukan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner pada penggunaan yang berulang. Uji asumsi klasik memiliki makna pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang didapat bisa dianalisis dengan metode analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas. Dilakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan terakhir dilakukan uji hipotesis yang memiliki 4 tahapan yaitu analisis regresi linear ganda, uji koefisien determinasi, uji pengaruh simulasi, dan uji regresi parsial.

3.6 Algorithm/Pseudocode

Algorithm 1. Prosedur Penelitian

INPUT: populasi WP-OP KPP Pratama Serpong, kuesioner teruji

OUTPUT: koefisien β , nilai R^2 , F, dan t

- 1: Tentukan desain kuantitatif-asosiatif & rumuskan hipotesis
 - 2: Hitung ukuran sampel (*convenience sampling*, $n=100$)
 - 3: Susun kuesioner Likert 5-skala $\rightarrow$ uji validitas & reabilitas
 - 4: Sebar kuesioner Januari-Juni 2024 dan himpun fdata
 - 5: Deskriptifkan data (mean, SD, min-max)
 - 6: Uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas)
 - 7: Estimasi regresi linier berganda, hitung R^2 , F, t
 - 8: Tafsir hasil; tarik kesimpulan & implikasi kebijakan
-

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini diterapkan pada probagi Wajib Pajak yang sudah terdaftar di KPP Pratama Serpong, salah satu bagian kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Banten. Objek penelitian dipilih karena representatif dalam menggambarkan perilaku kepatuhan dan potensi penggelapan pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan tarif pajak pada penggelapan pajak dengan pendekatan kuantitatif berbasis survei kuesioner.

4.1.1 Sampel dan Karakteristik Responden

Jumlah populasi wajib pajak di KPP Pratama Serpong mencapai 174.663. Peneliti menggunakan teknik *convenience sampling* untuk menentukan 100 responden sebagai sampel. Penentuan ini didasarkan pada rumus Slovin dengan margin of error 10%. Teknik ini dipilih karena efisien, memungkinkan pengambilan data secara langsung dari wajib pajak yang mudah dijangkau, dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Responden yang ada memiliki perbandingan 51% laki-laki dan 49% perempuan. Perbedaan ini menunjukkan distribusi yang cukup seimbang. Perbedaan gender berpotensi memengaruhi persepsi terhadap kualitas layanan maupun reaksi terhadap tarif pajak. Umumnya, perempuan cenderung lebih responsif terhadap kualitas interaksi dan kejelasan informasi, sedangkan laki-laki lebih fokus pada efisiensi dan beban biaya. Dilihat dari kelompok usia, mayoritas responden (42%) berusia 17–25 tahun. Responden usia muda umumnya lebih terbuka terhadap sistem pajak digital, tetapi lebih kritis terhadap ketidakadilan tarif. Sebaliknya, kelompok usia lebih tua cenderung mengalami kesulitan administratif, yang bila tidak ditangani dengan baik dapat mendorong penggelapan pajak.

Berdasarkan status pernikahan, 62% responden sudah menikah. Wajib pajak yang sudah menikah cenderung lebih sensitif terhadap efisiensi pelayanan dan beban tarif karena harus mengelola keuangan rumah tangga. Ini menjadikan mereka lebih rentan terhadap ketidakpuasan jika sistem pajak tidak berjalan optimal. Tingkat pendidikan responden didominasi lulusan SMA/SMK (52%), disusul sarjana (29%), D3 (14%), dan S2 (5%). Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berbanding lurus dengan pemahaman terhadap sistem pajak dan pentingnya kepatuhan. Responden dengan pendidikan rendah cenderung memiliki pemahaman terbatas dan merasa terbebani oleh prosedur atau tarif yang tinggi.

Dilihat dari pekerjaan, 47% responden bekerja di sektor swasta, 23% sebagai pegawai, 14% wiraswasta, 14% lainnya, dan 2% PNS. Pekerjaan memengaruhi preferensi terhadap pelayanan. Pekerja swasta, misalnya, menginginkan proses cepat dan efisien, sementara wiraswasta lebih menuntut fleksibilitas. Tarif yang tinggi dan pelayanan yang buruk akan berdampak signifikan terhadap niat melakukan penggelapan

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Menurut [17], statistika deskriptif adalah sebuah pendekatan dalam statistik yang terkait dengan cara mengumpulkan dan menampilkan data untuk menciptakan informasi yang berguna. Dalam studi ini, analisis statistik deskriptif dibahas dengan melibatkan 100 responden yang berasal dari kuesioner yang telah disebar. Variabel yang diperhatikan pada studi ini yaitu mencakup kualitas pelayanan (X1), tarif pajak (X2), beserta penggelapan pajak (Y). Data yang didapat oleh peneliti yaitu pada variabel kualitas pelayanan terdapat nilai minimum 6 serta nilai maksimum 30 melalui 0 rata-ratanya dari total jawabannya yaitu 23,27 beserta standar deviasi yang sejumlah 5,224. Di dalam variabel tarif pajak terdapat batas nilai terendah yaitu 5 dan batas nilai paling tinggi sejumlah 25 melalui rata-ratanya dari total respons 19,28 beserta standar deviasinya mencapai 4,540. Dalam variabel penggelapan pajak, terdapat nilai suatu nilai paling kecil dengan jumlah 7 beserta nilai paling besar dengan jumlah 35, melalui rata-rata total respon 17,69 beserta deviasi standar sebesar 6,797 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Pelayanan	100	6	30	23,27	5,224
Tarif Pajak	100	5	25	19,28	4,540
Penggelapan Pajak	100	7	35	17,69	6,797
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah peneliti, 2024 menggunakan SPSS 26.

4.2.2 Uji Kualitas Data

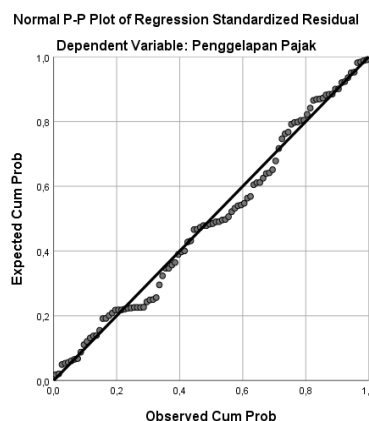
Dilakukan uji validitas agar dapat menilai apakah pada suatu alat ukur dapat dianggap valid maupun tidak. Alat ukurnya adalah kumpulan pertanyaan pada bentuk kuesioner. Kuis-ioner tersebut dinyatakan valid apabila pertanyaan yang diajukan bisa menyajikan informasi dengan relevan melalui hal yang diukur kan atas kuis-ioner itu. Pengukuran validitas ini

dilakukan memakai SPSS 26. Dalam menetapkan apakah pada sebuah item layak dipakai, umumnya dilaksanakan pengujian signifikansi koefisien korelasinya di dalam tingkat signifikansi yang sejumlah 0,05 dengan memiliki arti bahwa sebuah item akan dinyatakan valid apabila ada korelasi dengan signifikan melalui total skornya. Hasil r hitung akan dibandingkan dengan nilai r_{tabel} , dengan tingkat kesalahan 5%, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan valid. Jumlah responden dalam studi ini adalah 100 individu yang dihitung menggunakan rumus $d(f) = n - 2$ maka didapatkan hasil hitung $d(f)$ adalah 98. Pada r tabel, nilai ke 98 menunjukkan angka 0,1966. Berikut merupakan rekapitulasi hasil untuk validitas pada penelitian ini. Untuk semua poin pernyataan variabel X1, X2, dan Y menunjukkan bahwasanya seluruh item pernyataan yang digunakan dalam studi ini berasal dari populasi yang memiliki instrumen yang sah karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Uji reliabilitas dijalankan melalui penggunaan teknik Cronbach's Alpha lewat mengikutsertakan 100 responden sebagai sampel. Suatu instrumen dalam kuesioner dinyatakan reliabel apabila menghasilkan nilai lebih dari 0,6. Hasil dari pengujian reliabilitas. Cronbach's Alpha-nya adalah 0,918 dengan banyak 6 pertanyaan, yang menandakan bahwa nilai tersebut melebihi 0,60. Disebabkan hal tersebut, variabel literasi perpajakan bisa dipandang reliabel atau handal. Cronbach's Alpha-nya adalah 0,891 dengan banyak 5 pertanyaan, yang menandakan bahwa nilai tersebut melebihi 0,60.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

Dilakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Menurut [3], bahwasanya tujuan atau pengujian normalitas yaitu agar dapat memverifikasi apakah variabel sisa pada model regresi mengikuti distribusi normal. Dalam model regresi yang sempurna, variabel sisa seharusnya terdistribusi normal. Melihat hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel, nilai Asymp. Sig yang diperoleh yaitu 0,165. Karena nilai ini lebih tinggi dari tingkat kontribusi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki distribusi normal dan sesuai untuk pengujian regresi. Kemudian diperkuat dengan uji visual Normal P-P Plot bahwa output hasil normal P-P Plot menunjukkan sebaran data mendekati garis diagonal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas (Grafik P-Plot of Regression Statistic)

[3] menguraikan bahwa pengujian multikolinearitas dilaksanakan untuk menganalisis adanya keterkaitan antar variabel independen pada model regresi. Sebuah model regresi yang efektif baiknya tidak memperlihatkan terdapat hubungan yang saling terkait antar variabel independennya. Hasil dari pengujian multikolinieritas dapat ditemukan pada tabel Coefficients (nilai tolerance dan VIF). Berdasarkan output yang ada, VIF untuk setiap variabel independen, yaitu X1 (kualitas pelayanan) dan X2 (tarif pajak) adalah di bawah 10, dengan nilai masing-masing 1,388, sementara nilai tolerance melebihi 0,1, dan untuk setiap variabel nilainya adalah 0,720. Ini mengindikasikan bahwasanya tidak ada hubungan yang signifikan antara dua variabel independen tersebut, sehingga bisa didapatkan kesimpulan bahwa multikolinieritas tidak terjadi.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas.

Model	Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1. (constant)	1,666	3,086		,540	,591	
Kualitas Pelayanan	,423	,137	,325	3,085	,003	1,388
Tarik Pajak	,321	,158	,214	2,036	,044	1,388

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2024 menggunakan SPSS 26.

4.2.4 Uji Hipotesis

Beberapa pengujian yang telah dijalankan adalah uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji keterandalan model, dan uji koefisien regresi. Model regresi linier berganda memperlihatkan adanya variabel kualitas pelayanan dan tarif pajak secara bersamaan mempunyai pengaruh kepada penggelapan pajak dengan persamaan 2 regresi:

$$Y = 1,666 + 0,423X_1 + 0,321X_2 + \varepsilon \quad (2)$$

Konstanta 1,666 menunjukkan bahwa jika X_1 dan X_2 bernilai nol, maka Y bernilai 1,666. Persoalan tersebut menampilkan bahwasanya setiap kali terjadi peningkatan tarif pajak, penggelapan pajaknya juga meningkat sejumlah 0,321. Dengan koefisien regresi yang menampilkan angka positif menandakan bahwa terdapat hubungan linier diantara tarif pajak beserta tingkat penggelapan pajaknya. Dalam kata lain, dengan semakin bertambahnya tarif pajak, peluang terjadinya penggelapan pajak pun lebih tinggi.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1. (constant)	1,666	3,086		,540	,591
Kualitas Pelayanan	,423	,137	,325	3,085	,003
Tarik Pajak	,321	,158	,214	2,036	,044

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2024 menggunakan SPSS 26.

Dalam penggunaan R-Square terjadi ketika hanya ada satu variabel independen dalam regresi linier yang sederhana), sementara itu Adjusted R-Square diterapkan apabila terdapat beberapa variabel independen. Dalam studi ini, penulis memutuskan untuk memakai R-Square meskipun terdapat variabel independen yang jumlahnya melebihi satu. Model summary menampilkan bahwasanya nilai yang dimiliki R Square tercatat sebesar 0,225 maupun setara dengan 22,5%. Ini berarti bahwa 22,5% dari variasi dalam penggelapan pajak pada model regresi yang diterapkan dalam studi ini dipengaruhi oleh faktor tarif pajak dan faktor kualitas pelayanan. Sementara itu, sisanya yang mencapai 77,5% dipengaruhi oleh elemen-elemen lainnya yang tidaklah tercakup pada penelitian ini.

Penggunaan dari uji F yaitu agar dapat menilai apakah pada suatu model regresi yang ada di penelitian ini dapat dikategorikan layak maupun tidak. Keputusan ditentukan berdasarkan nilai signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika dalam tabel ANOVA nilai Sig. yang sejumlah $\leq 0,05$, berarti pada model regresi dianggap layak. Namun, apabila nilai Sig. yang dimiliki $> 0,05$, maka model regresi dianggap tidak memenuhi kriteria kelayakan. Nilai yang dimiliki Fhitung di-

peroleh sejumlah 14,093 dengan signifikan 0,000 karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar 3.09 yang di mana perhitungannya pada taraf signifikansi 5% melalui $df = n - k - 1 = 100 - 2 - 1 = 97$, nilai yang dimiliki F_{tabel} yaitu sejumlah 3,09 dan tingkat kontribusi 0,000 jika nilainya kurang dari 0,05, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dijumpai dampak bersama dengan signifikan dan simultan diantara tarif pajak beserta kualitas pelayanan kepada penggelapan pajak, sehingga penggunaan dari model regresi pada pelaksanaan penelitian ini dipandang valid. Penggunaan dari suatu uji t yaitu agar dapat melakukan evaluasi sejauh mana dampak dari masing-masing variabel independen kepada suatu variabel dependen [3]. Diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel Kualitas Pelayanan = 3,085 dan nilai signifikansi adalah 0,003. Dengan $df = n - k - 1 = 97$ didapatkan nilai t_{tabel} yaitu 1,985. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan aturan pengambilan keputusan diatas maka variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap variabel penggelapan pajak. Diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel Tarif Pajak = 2,036 dan nilai signifikansi adalah 0,044. Dengan $df = n - k - 1 = 97$ didapatkan nilai t_{tabel} yaitu 1,985. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan aturan pengambilan keputusan diatas maka variabel tarif pajak berpengaruh secara signifikan kepada penggelapan pajak.

4.3 Pembahasan Penelitian

4.3.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Tarif Pajak Secara Simultan Terhadap Penggelapan Pajak

Hasil uji F menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan tarif pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak, di mana kombinasi pelayanan fiskus yang buruk dan tarif pajak yang tinggi dapat meningkatkan persepsi ketidakadilan sehingga mendorong wajib pajak melakukan penggelapan [10] dan [11]. Sebaliknya, pelayanan yang baik dapat menurunkan persepsi negatif, meskipun tarif pajak relatif tinggi. Dengan demikian, sinergi antara peningkatan kualitas pelayanan dan peninjauan kembali kebijakan tarif menjadi penting.

4.3.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak

Uji t menunjukkan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang profesional, transparan, dan mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Kepercayaan ini menurunkan niat untuk melakukan penggelapan. Temuan ini mendukung studi [18] dan [19] yang juga menemukan kualitas pelayanan berperan penting dalam menekan praktik penggelapan pajak. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh [21] yang menekankan faktor psikologis seperti *love of money* lebih dominan. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa di konteks perkotaan seperti Serpong, aspek pelayanan lebih menonjol dibanding faktor psikologis.

4.3.3 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Uji t menunjukkan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Temuan ini mendukung pandangan teori ekonomi bahwa beban pajak yang tinggi menimbulkan persepsi tidak adil, sehingga wajib pajak mencari celah untuk mengurangi kewajiban, termasuk melalui penggelapan. Hasil penelitian ini konsisten dengan [20] serta [21] yang juga menemukan tarif pajak memicu penggelapan. Namun, penelitian [19] dan [21] justru melaporkan tarif pajak tidak signifikan, menunjukkan bahwa faktor kontekstual, misalnya tingkat pendapatan atau kesadaran hukum dapat memoderasi pengaruh tarif pajak. Hal ini berarti, di KPP Pratama Serpong, tarif pajak masih dipersepsikan sebagai beban yang memberatkan sehingga berimplikasi langsung pada perilaku penggelapan.

5. Perbandingan

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menggabungkan dua variabel utama, kualitas pelayanan dan tarif pajak dalam satu model regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruhnya sehingga terjadi penggelapan pajak. Demikian berbeda dari penelitian yang sudah ada, seperti [5], yang menggunakan lima variabel independen namun tidak menyertakan tarif pajak sebagai salah satu faktor. Sementara itu, [10] hanya meneliti pengaruh tarif pajak

terhadap pelaku e-commerce tanpa mempertimbangkan kualitas pelayanan. Studi tersebut juga dengan sejumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Serpong, yang belum banyak dibuat fokus dalam studi sebelumnya, sehingga menghadirkan perspektif baru dalam konteks urban dan wajib pajak individu. Pemilihan lokasi ini memberikan kekhasan tersendiri, karena karakteristik wajib pajak di daerah tersebut sangat bervariasi dan mencerminkan dinamika kepatuhan yang kompleks.

Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linier berganda dengan rangkaian uji asumsi klasik yang lengkap, diantaranya uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Pendekatan ini dinilai lebih kuat dan valid jika dibandingkan dengan beberapa studi terdahulu yang hanya menampilkan analisis korelasional atau tidak menguraikan asumsi klasik secara detail. Selain itu, indikator variabel dalam penelitian ini diadaptasi dari teori dan hasil penelitian sebelumnya, seperti SERVQUAL untuk kualitas pelayanan dan indikator tarif pajak, yang memastikan bahwa instrumen yang digunakan relevan secara teoritis dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model yang lebih terfokus, kuat secara metodologis, serta memiliki implikasi kebijakan yang langsung dapat diterapkan dalam peningkatan pelayanan perpajakan dan evaluasi tarif pajak.

6. Kesimpulan

Setelah menganalisis data dan membahasnya di bab sebelumnya, serta merujuk pada hipotesis yang telah dibuat, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: (1) Kualitas pelayanan dan tarif pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, (2) Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, (3) Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Dan memiliki beberapa keterbatasan yaitu fokus yang hanya kepada yang memengaruhi penggelapan pajak, Waktu, tenaga, kemampuan peneliti, dan kesimpulan hanya berdasarkan analisis data yang ada. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan dan peninjauan kembali kebijakan tarif pajak menjadi dua aspek penting dalam meminimalisir praktik penggelapan pajak. Sehingga terdapat beberapa saran dalam penelitian ini yaitu petugas pajak perlu dilatih serta dilakukan evaluasi untuk memberikan pelayanan yang transparan, adil, dan profesional. Kemudian juga pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan skema tarif pajak progresif yang lebih fleksibel.

Kontribusi Penulis : Penulis memberikan kontribusi ilmiah melalui integrasi dua variabel utama dalam satu model analisis, serta dengan mengangkat konteks lokal dari KPP Pratama Serpong yang belum banyak diteliti sebelumnya. Penelitian ini juga mengembangkan instrumen berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, serta menerapkan analisis statistik yang lengkap, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam studi kebijakan perpajakan dan kepatuhan pajak.

Pendanaan : Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal

Pernyataan Ketersediaan Data : 100 wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Serpong merupakan data penelitian yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dari kuesioner yang disebar. Data lengkap tersedia dan dapat diakses oleh peneliti yang berkepentingan, dengan permintaan langsung kepada penulis.

Ucapan Terima Kasih : Kepada Dr. Septian Arief Budiman, S.Pd.I, M.Pd.I, sebagai dosen pembimbing penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan arahnya dalam pengerjaan penelitian ini. Kepada pihak KPP Pratama Serpong atas dukungan dan izin yang diberikan untuk pengambilan data penulis juga mengucapkan terimakasih, serta untuk seluruh responden yang bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner dari penulis. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada keluarga dan rekan-rekan yang memberikan dukungan moral dan motivasi hingga penelitian ini selesai dengan baik.

Konflik Kepentingan : "Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan."

Daftar Pustaka

- [1] D. Auliana and I. Muttaqin, "Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak," *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, vol. 1, no. 1, pp. 18–42, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- [2] R. Febrina, "Pengaruh Bukti Fisik, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Dan Empati Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Bukittinggi," *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, vol. 1, no. 01, pp. 22–35, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v1i01.29>
- [3] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM.SPSS 26*, 10th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.
- [4] U. F. Jamalallail and M. G. K. Indarti, "Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi," *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, vol. 14, no. 1, pp. 93–106, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.93-106>
- [5] I. Kamil, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Perpajakan, Sanksi Denda, Kemampuan Finansial Dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, vol. 1, no. 1, pp. 17–44, 2021. [Online]. Available: <http://journal.moestopo.ac.id/index.php/jakpi>
- [6] M. Khairunnisa, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Semarang)," *Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung*, 2021.
- [7] A. Mappadang, *Efektifitas Tax Avoidance & Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan*. Bandung: CV. Pena Prasada, 2021.
- [8] D. Styarini and T. S. Nugrahani, "Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion," *Akuntansi Dewantara*, vol. 4, no. 1, pp. 22–32, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>
- [9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [10] D. K. Wardani and P. Rahayu, "Pengaruh E-Commerce, Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak," *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, vol. 5, no. 1, pp. 43–49, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.13915>
- [11] E. R. Weti and U. B. Dharma, "Pengaruh Sistem perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, vol. 2, no. 2, 2022.
- [12] Y. Yetmi, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Teknologi Informasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi," *E-Journal Universitas Islam Syekh-Yusuf*, vol. 25, no. 1, pp. 80–93, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.33592/jeb.v1i25.289>
- [13] L. D. Martias, "Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi," *Fibris: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, vol. 16, no. 1, pp. 40–59, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.161.40-59>
- [14] E. Widiastuti and S. N. Crissianan, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor," *Sakuntala*, vol. 1, no. 1, pp. 449–462, 2021.
- [15] E. Widayanti, D. S. Wulandari, and D. A. Prihasteti, "Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak," *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, vol. 3, no. 4, pp. 541–549, 2023.
- [16] F. Fatimah and D. K. Wardani, "Pengaruh Ketidakpastian Perpajakan, Moral Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Penggelapan Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2017.
- [17] R. A. Rifani, M. Mursalim, and H. Ahmad, "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak," *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol. 2, no. 3, pp. 131–144, 2019.
- [18] F. Fitri, H. T. S. Mulyani, and A. A. Agin, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada KPP Pratama Pangkalpinang)," *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan (JABK)*, vol. 6, no. 2, pp. 1–8, 2019.
- [19] F. Fitri, H. T. S. Mulyani, and A. A. Agin, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada KPP Pratama Pangkalpinang)," *in Prosiding SNA 15 Banjarmasin*, vol. 6, no. 2, p. 8, 2019.